



## Hibah Jadi Temuan DPRD Minta Konsep E-Hibah Jelas

Mangupura (Bali Post) -

Rencana penerapan e-hibah di Kabupaten Badung menjadi perhatian serius jajaran wakil rakyat di DPRD Badung. Mereka meminta pihak eksekutif membuat konsep e-hibah dengan jelas, sehingga tidak terjadi penyimpangan.

"Ini (e-hibah - red) bentuknya harus jelas. Setelah jadi, harus disosialisasikan dulu kepada seluruh masyarakat Badung, termasuk kita di dewan, sehingga paham mekanismenya bagaimana," ujar Ketua DPRD Badung Putu Parwata, Selasa (6/2) kemarin.

Politisi asal Dalung itu berharap pengembangan aplikasi elektronik hibah mampu menertibkan dan menata pemberian hibah. Sebab, transparansi melalui sistem elektronik untuk hibah dan bansos sangat dibutuhkan agar penyaluran dapat tepat sasaran. "Penerapan sistem e-hibah juga bertujuan memastikan penyaluran dana tepat sasaran," tegasnya.

Sekda Badung I Wayan Adi Arnawa mengatakan, dengan penerapan e-hibah proses pengajuan hibah menjadi lebih tertib dan tidak boleh ada tawar-menawar. Sebab, sistem ini tidak main-main dan tidak boleh ada tawar-menawar lagi. "Waktu persyaratan termasuk mungkin kalau ada kelompok masyarakat yang sudah dua kali berturut-turut secara otomatis sistemnya akan menolak, jadi sudah *on the track*," ujarnya.

Mantan Kadispenda Badung ini menambahkan, e-hibah merupakan upaya perbaikan dengan tetap mengacu pada peraturan yang berlaku. "Proses apa pun yang kemarin terjadi, kita segera selesaikan. Bagaimana memban-

gun sistem yang bagus tanpa meninggalkan yang di tahun 2018," katanya.

Adi Arnawa mengatakan ada kesamaan pandangan antara eksekutif dan legislatif terkait pencairan hibah, sehingga bantuan ini aman dan nyaman bagi semua pihak. Ia juga berharap para penerima hibah taat asas dan mengikuti aturan pencairan hibah, sehingga bantuan ini tidak menjadi masalah hukum di kemudian hari. "Kami sangat berterima kasih dan memberikan apresiasi karena dengan rapat ini kita bisa menyamakan persepsi dan pandangan terkait pola pencairan hibah di Kabupaten Badung," tegasnya. (kmb27)

Edisi : Rabu, 7 Februari 2018

Hal : 3



# Kadis Kominfo Ditahan di Rutan Negara Ditempatkan di Ruang Mapenaling

Negara (Bali Post) -

Pascadiperiksa satu setengah jam dan ditetapkan sebagai tersangka, Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Kabupaten Jembrana IGN Putra Riyadi langsung ditahan. Tersangka pun ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas II B sebagai titipan dari jaksa. Begitu juga tersangka Nengah Darna. Kedua tersangka kasus dugaan korupsi retribusi Terminal Manuver Gilimanuk ini kini ditempatkan di ruangan masa pengenalan lingkungan (mapenaling).

Kepala Rutan Negara Kelas II B Purniawal saat dikonfirmasi, Selasa (6/2) kemarin, membenarkan pihaknya telah menerima dua tahanan titipan dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Jembrana tersebut. Sesuai prosedur, tahanan yang baru masuk ini akan ditempatkan di ruangan mapenal-

ing. Nantinya, akan dipindahkan ke ruang tahanan yang lebih luas. "Sekarang masih di kamar mapenaling. Keduanya dalam keadaan sehat. Tadi (kemarin - red) baru saja dicek dokter," ujar Purniawal.

Sementara itu, Kasi Pidsus Kejari Jembrana Made Pasek Budiawan saat dit-

anya mengenai perkembangan kasusnya mengatakan pihaknya masih terus mendalami kasusnya. Ia menerangkan, tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka lainnya dalam kasus ini. Untuk kedua tersangka ini, katanya, dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. "Kita lihat fakta di persidangan nantinya," ucap mantan Kasi Pidsus Kejari Klungkung ini.

Seperti berita sebelumnya, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Jembrana, PR, akhirnya ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan

Negeri (Kejari) Jembrana, Senin (5/2). Tak hanya itu, PR juga langsung ditahan setelah menjalani pemeriksaan selama satu setengah jam di ruang penyidik Seksi Pidana Khusus (Pidsus). PR ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan dalam kasus dugaan penyimpangan retribusi Terminal Manuver Gilimanuk. Selain pejabat eselon II di Pemkab Jembrana ini, Kejari juga menahan tersangka sebelumnya yakni ND yang saat itu menjabat sebagai Kepala Koordinator Terminal Manuver Gilimanuk. (kmb26)

Edisi : Rabu, 7 Februari 2018  
Hal : 10



## Kasus Korupsi Lahan Tahura

# Lahan Sinarmas Disita Negara

Denpasar (Bali Post) -

Sempat tertunda beberapa kali, tuntutan atas perkara korupsi lahan tahura di Jalan By-Pass Ngurah Rai, Suwung Batan Kendal, Denpasar Selatan, Selasa (6/2) kemarin, akhirnya dibacakan. Saat sidang di Pengadilan Tipikor Denpasar, JPU Gede Budi Suardana dan kawan-kawan menuntut dua terdakwa yakni I Wayan Suwirta yang mengklaim sebagai pemilik lahan dan I Wayan Sudarta alias Agus yang mengurus pensertifikatan dengan hukum yang berbeda.

Menariknya, dalam surat tuntutan jaksa juga disebutkan bahwa lahan yang sudah dibangun Bank Sinarmas juga disita oleh negara. Pasalnya, dari 853 meter persegi lahan, 712 meter persegi di antaranya diklaim milik tahura.

Dalam berkas dan persidangan secara terpisah, pertama yang didudukkan di kursi pesakitan adalah terdakwa Suwirta. Jaksa pada pokoknya menyatakan Suwirta tidak terbukti dalam dakwaan primer. Namun terbukti bersalah dalam dakwaan subsider, yakni melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 UU Tipikor. Terdakwa kemudian dituntut selama dua tahun penjara, dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada di dalam tahanan. Di samping itu, jaksa juga mengatakan uang Rp 100 juta yang dititipkan terdakwa dikembalikan pada terdakwa. Masih dalam surat tuntutan, JPU dari Kejati Bali itu menuntut Suwirta dengan pidana denda Rp 100 juta, subsider tiga bulan kurungan.

Sedangkan tuntutan untuk terdakwa Sudarta alias Agus sedikit lebih berat. Dia dijerat pasal yang sama, namun beda tuntutan. Dalam sidang di Pengadilan Tipikor Denpasar, Sudarta yang berperan mengurus sertifikat dituntut dengan pidana penjara 2,5 tahun. Uang Rp 100 juta yang dititipkan juga dikembalikan. Terdakwa juga dibebankan membayar denda Rp 100 juta, apabila tidak membayar maka diganti pidana lima bulan kurungan. (kmb37)



Bali Post/kmb37

**TUNTUTAN - Suwirta bersama kuasa hukumnya se usai mendengar tuntutan dari JPU, Selasa (6/2) kemarin.**

Edisi : Rabu, 7 Februari 2018

Hal : 2



## Pencairan Hibah Tersendat, Dewan "Pengeng"

**Mangupura (Bali Post) -**

Jajaran wakil rakyat di DPRD Badung dibuat pusing oleh mekanisme pencairan hibah yang tersendat-sendat. Kondisi ini menjadi sorotan semua fraksi di parlemen, karena menganggap kinerja eksekutif lamban dalam memproses hibah.

Ketua Komisi I DPRD Badung I Wayan Suyasa mengaku sangat menyangkan dari proses proposal hingga pencairan hibah selama ini tidak terstruktur dan cenderung berbelit-belit. Padahal hibah yang digelontor Pemkab Badung merupakan hasil kesepakatan bersama antara Bupati dan DPRD. "Jadi, jajaran eksekutif selaku pelaksana Bupati mestinya membantu proses hibah ini agar bisa terealisasi dengan baik. Siapapun tidak berani proses hukum. Dan saya sangat setuju hibah ini aman dan nyaman. Cuma kalau prosesnya dibuat berbelit-belit dan bolak-balik begini kan kasihan masyarakat," ujar politisi Golkar ini dalam Rapat Pimpinan, Senin (5/2) lalu.

Suyasa mengaku malu menjadi sorotan masyarakat lantaran hibah tak kunjung diproses. Padahal secara teknis kewenangan berada di tangan eksekutif, sedangkan politisnya dewan dan bupati. "Jiwa kami sama dengan Bapak Bupati tidak suka bertele-tele. Namun, bisa 60 proposal bolak-balik. *Nak pengeng masa Dewan ne Pak* (sakit kepala dewan juga, Pak - red), karena tidak ini saja yang kita urus," katanya.

Hal senada juga dilontarkan politisi Golkar lainnya, I Nyoman Mesir. Politisi asal Kutuh, Kuta Selatan ini mengatakan, proses hibah di tahun 2018 rancu. "Masak proses proposal dilempar sini, dilempar situ. Ubah ini, ubah itu. Ke depan saya tidak mau begini lagi," katanya mengkritisi.

Ketua Komisi III Putu Alit Yandinata juga mengaku bingung dengan sikap eksekutif. "Saya juga bingung. Ini kan masalah teknis. Kalau teknis itu ranah eksekutif, politis baru legislatif. Ini kok acuan secara teknis eksekutifnya tidak tahu?" katanya menyoroti.

Secara teknis, kata politisi PDI Perjuangan ini, mestinya proposal yang di awal setelah memenuhi syarat hanya berubah pada RAB. Namun, faktanya sekarang hampir semua redaksi proposal berubah. Ironisnya lagi, pemohon hibah sekarang harus mencari lagi pejabat-pejabat yang sudah pensiun dan pindah untuk menandatangani proposal tahun 2017. "Kejadian sekarang kan proposal sudah direvisi, lagi ditelepon harus direvisi. Sudah direvisi, lagi ada salah. Kalau begitu terus kan dibentak-bentak aspri kami oleh masyarakat," jelasnya.

Hal serupa juga disampaikan I Gusti Anom Gumanti dan I Made Retha serta Gede Suardika. Dikatakan, sangat lucu pejabat yang sudah pensiun dan mutasi diminta menandatangani proposal lagi. "Masak kami harus meminta pejabat pensiun

tanda tangan proposal lagi? Iya, kalau pejabatnya mau. Kalau pun mereka mau, memangnya tidak masalah?" sorot Anom Gumanti.

Terbukti ribuan proposal yang difasilitasi anggota Dewan sampai lebih dari enam kali bolak-balik perbaikan akibat tidak adanya pola dan teknis proposal yang akurat dari eksekutif. Menurut kalangan dewan, tidak akuratnya informasi yang disajikan eksekutif ini membuat masyarakat pemohon bantuan seperti dipermainkan.

Dalam rapat yang dipimpin Ketua DPRD Badung Putu Parwata, Sekda Badung I Wayan Adi Arnawa mengakui dalam proses proposal ada beberapa penyesuaian, sehingga proposal ada beberapa perubahan. "Penyesuaian ini untuk amannya pencairan hibah, sehingga pentingnya penyesuaian persepsi. Bagaimana hibah ini aman dan nyaman untuk kita bersama. Kami akui memang proposal tahun 2018 induk perlu beberapa penyesuaian," katanya.

Mantan Kadispenda Badung ini mengatakan, pihaknya sangat hati-hati dalam masalah hibah. Sebab, hibah di Badung sedang menjadi atensi aparat penegak hukum. "Hibah ini jadi atensi aparat penegak hukum. Jadi, demi amannya ada beberapa harmonisasi proposal, misalnya perubahan tanggal dan seterusnya," ujarnya seraya memerintahkan Bagian Kesra untuk membantu proses harmonisasi proposal yang masuk. (kmb27)

Edisi : Rabu, 7 Februari 2018

Hal : 3



## Puluhan Sekolah Kekurangan Sarana Pendidikan Tahun Ini, Pengadaan Dianggarkan Rp 5 Miliar

Semarapura (Bali Post) -

Puluhan Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Klungkung kekurangan sarana pendidikan. Atas kondisi itu, tahun anggaran 2018 ini Pemkab mengalokasikan miliaran rupiah untuk pengadaan. Hal tersebut masih dalam tahap proses. Selain itu, sejumlah SMP juga tercatat kekurangan Ruang Kelas Belajar (RKB).

Kasi Kelembagaan Sarana dan Prasarana Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Klungkung Nyoman Sukadana menjelaskan sesuai data terakhir, jumlah SD mencapai 150 yang tersebar di Kecamatan Klungkung, Banjarangkan, Dawan dan Nusa Penida. Dari jumlah itu, sekitar 90 sekolah masih kekurangan sarana pendidikan. Seperti peraga olahraga, mata pelajaran matematika, dan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA). "Sebagian besar sarana pendidikannya belum memadai," ungkapnya, Selasa (6/2) kemarin.

Di tengah situasi seperti itu, proses belajar mengajar untuk sementara memanfaatkan sarana yang diadakan pada 2010. Pengadaannya

yang baru dilaksanakan tahun ini dengan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp 5 miliar. "Sekolah ini masih memiliki sarana pendidikan. Tetapi ada yang rusak. Tidak bisa dipakai. Dengan anggaran itu, pemenuhannya bisa tuntas," sebutnya.

Sementara itu, terkait dengan pengadaan buku perpustakaan, dinyatakan baru menysasar 44 sekolah yang dananya berasal dari pemerintah pusat. Kekurangan ruang guru atau kepala sekolah secara khusus maupun Unit Kesehatan Siswa (UKS) juga masih membelit sejumlah sekolah.

Guna mengatasi hal itu, masih dilakukan dengan menyekat ruang kelas untuk

sementara waktu. "Kalau mengacu pada standar nasional, itu harus ada. Tetapi meskipun memanfaatkan ruangan lain, dengan diskat, aktivitas belajar tidak mengganggu proses belajar-mengajar. Semua berjalan baik," terangnya.

Disampaikan lebih lanjut, kekurangan RKB pada jenjang SMP juga masih menjadi persoalan. Sesuai hasil pemetaan, kondisi itu membelit SMPN 2 Dawan sebanyak enam ruangan, SMPN 1 Semarapura SMPN 3 Semarapura masing-masing tiga ruangan dan SMPN 6 Nusa Penida sebanyak tiga ruangan dan dilakukan pembangunan tahun ini. Atas hal tersebut, untuk sementara sekolah menerapkan *double sift*.

"Kalau SMPN 4 Nusa Peni-

da tidak kurang kelas. Tetapi bangunannya rusak parah. Ini nantinya akan dibangun ulang," sebutnya. Sementara itu, untuk jenjang SD, dinyatakan masih tergolong memadai. Sesuai target Bupati Klungkung Nyoman Súwirta, paling lambat 2019 tidak ada lagi sekolah yang kekurangan sarana dan prasarana.

Hal tersebut, oleh Sukadana optimis terealisasi jika anggaran yang diberikan langsung dalam jumlah besar. Pasalnya, untuk menuntaskan itu, sesuai perhitungannya, dibutuhkan sekitar Rp 40 miliar. "Kalau misalnya pagu anggaran diberikan Rp 10 miliar, kan sudah pasti tidak bisa tuntas," pungkasnya. (kmb45)